



**Universitas Katolik Parahyangan Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan
Internasional**

Terakreditasi Unggul

SK BAN-PT No. 2579/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**Penerapan Prinsip-prinsip *Fair Trade* oleh Patagonia
terhadap Pekerja dan Petani Kapas di India**

Skripsi

Oleh

Indra Widjaja

2017330200

BANDUNG

2022



**Universitas Katolik Parahyangan Fakulta
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan
Internasional**

Terakreditasi Unggul

SK BAN-PT No. 2579/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**Penerapan Prinsip-prinsip *Fair Trade* oleh Patagonia
terhadap Pekerja dan Petani Kapas di India**

Skripsi

Pembimbing

Dr. phil. Aknolt Kristian Pakpahan, MA

BANDUNG

2022

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Hubungan Internasional
Program Studi Hubungan Internasional Program Sarjana



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Indra Widjaya
Nomor Pokok : 2017330200
Judul : Penerapan Prinsip-prinsip Fair Trade oleh Patagonia terhadap Pekerja dan Petani Kapas di India

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Selasa, 21 Juni 2022
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota

Dr. A. Irawan J.H

: 

Sekretaris

Dr. Aknolt K. Pakpahan

: 

Anggota

Mireille Marcia Karman, M.Litt.

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

"Penerapan Prinsip-prinsip Fair Trade oleh Patagonia terhadap pekerja dan petani kapas di India"

ORIGINALITY REPORT

31 %
SIMILARITY INDEX

31 %
INTERNET SOURCES

2 %
PUBLICATIONS

5 %
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 repository.unpar.ac.id
Internet Source 26%

2 www.unfoldingdesigns.com
Internet Source 1%

3 www.sonwill.com
Internet Source 1%

4 Repository.unpar.ac.id
Internet Source 1%

5 medium.com
Internet Source <1%

6 jamanetwork.com
Internet Source <1%

7 Submitted to University of Portland
Student Paper <1%

8 www.researchgate.net
Internet Source <1%

9 vsmti.hr
Internet Source <1%

10	www.msn.com Internet Source	<1 %
11	Submitted to Catholic University of Parahyangan Student Paper	<1 %
12	www.cottonworks.com Internet Source	<1 %
13	docobook.com Internet Source	<1 %
14	Submitted to Curtin University of Technology Student Paper	<1 %
15	Submitted to SUNY Brockport Student Paper	<1 %
16	textileexchange.org Internet Source	<1 %
17	blog.lefigaro.fr Internet Source	<1 %
18	core.ac.uk Internet Source	<1 %
19	ilkom.unnes.ac.id Internet Source	<1 %
20	mtsalhusn.blogspot.com Internet Source	<1 %
21	setiyowidodo.blogspot.com Internet Source	<1 %

<1 %

22

www.slideshare.net

Internet Source

<1 %

23

www.wholesale-nfljersey.us.com

Internet Source

<1 %

24

123dok.com

Internet Source

<1 %

25

pt.scribd.com

Internet Source

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 3 words

Exclude bibliography On

ABSTRAK

Nama: Indra Widjaya

NPM: 2017330200

Judul: Penerapan Prinsip-prinsip *Fair Trade* oleh *Patagonia* terhadap pekerja dan petani kapas di India

Penelitian ini membahas mengenai penerapan prinsip *fair trade* yang dilakukan oleh perusahaan multinasional *Patagonia*, terhadap para pekerjanya dan para petani kapas di India. Kapas telah menjadi bahan utama di dalam dunia *fashion* tetapi tidak semua perusahaan meneguhkan prinsip keadilan bagi para pekerja dan petani. Namun, dengan hadirnya *free trade* berdampak buruk bagi kesejahteraan pekerja dan petani, dimana seringkali dieksploitasi dan dicurangi. *Patagonia* yang mengedepankan misi sosialnya, melakukan perdagangan bisnisnya dengan cara mengimplementasikan prinsip *fair trade*. Maka dari itu, penelitian ini berusaha menjawab sebuah pertanyaan penelitian, “***Bagaimana Patagonia Menerapkan Prinsip-prinsip Fair Trade terhadap Pekerjaannya?***” Penelitian ini mengacu pada 10 prinsip *fair trade* berdasarkan *World Fair Trade Organization* dalam menjawab rumusan masalah tersebut. Hasilnya, untuk menciptakan perdagangan dengan standar *fair trade* berjalan sebagaimana mestinya, perlu adanya kesadaran dan komitmen dari *Patagonia* yang telah menjalankan lima prinsip *fair trade* terhadap para pekerjanya dan petani.

Kata kunci: *Patagonia, Fair Trade, Petani kapas*

ABSTRACT

Nama: Indra Widjaya

NPM: 2017330200

Judul: The Efforts of Patagonia in Implementing Fair Trade Principles Towards workers welfare

*This study discusses the application of fair trade principles carried out by the multinational company Patagonia, to its workers and cotton farmers in India. Cotton has become a major ingredient in the fashion world but not all companies affirm the principle of justice for workers and farmers. However, the presence of free trade has a bad impact on the welfare of workers and farmers, which are often exploited and rigged. Patagonia puts forward its social mission, conducting business trading by implementing the principle of fair trade. Therefore, this study seeks to answer a research question, "**How does Patagonia Apply the Principles of Fair Trade to Its Workers?**" This study refers to 10 principles of fair trade based on the World Fair Trade Organization in answering the formulation of the problem. As a result, to create trade with fair trade standards as it should, there needs to be awareness and commitment from Patagonia which has implemented the five principles of fair trade to its workers and farmers.*

Keywords: Patagonia, Fair Trade, Cotton farmer

DAFTAR ISI

COVER.....	1
PERNYATAAN.....	1
ABSTRAK.....	3
<i>ABSTRACT</i>	4
DAFTAR ISI.....	5
DAFTAR AKRONIM.....	6
BAB I.....	8
PENDAHULUAN.....	8
1.1. Latar Belakang Masalah.....	9
1.2. Identifikasi Masalah.....	11
1.2.1. Pembatasan Masalah.....	13
1.2.2. Rumusan Masalah.....	14
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	14
1.3.1. Tujuan Penelitian.....	14
1.3.2. Kegunaan Penelitian.....	14
1.4. Kajian Literatur.....	14
1.5. Kerangka Pemikiran.....	18
1.6. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data.....	24
1.6.1. Metode Penelitian.....	24
1.6.2. Teknik Pengumpulan Data.....	24
1.7. Sistematika Pembahasan.....	25
BAB II.....	26
PROFIL PATAGONIA.....	26
2.1. Sejarah Patagonia.....	26
2.2. Visi dan Misi Patagonia.....	27
2.3. Filosofi dan Nilai-nilai dari Patagonia.....	29
2.4. Struktur Perusahaan Patagonia.....	30
2.4.1. Struktur Patagonia.....	30
2.4.2. Sumber Daya Manusia di Patagonia.....	31
2.5. Program Sosial Patagonia.....	32
2.6. Contoh Produk Patagonia.....	37
BAB III.....	38
IMPLEMENTASI FAIR TRADE PATAGONIA.....	38
3.1. Petani Kapas di India.....	38
3.2. Sejarah Kapas.....	41
3.3. Kegunaan <i>Cotton</i>	43
3.3.1. Kegunaan <i>Organic Cotton</i>	43
3.3.2. Kegunaan <i>Recycled Cotton</i>	44
3.4. Kerjasama Patagonia.....	47
3.4.1. Prinsip <i>Fair Trade</i> dan Patagonia.....	47
3.4.2. Fair Trade Patagonia di India.....	54
BAB IV.....	58
KESIMPULAN.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	60

DAFTAR AKRONIM

CFT: *Community Fair Trade*

FT: *Fair Trade*

FTLA: *Fair Trade Labor Association*

GATT: *General Agreement on Tariffs and Trade*

HAM: Hak Asasi Manusia

IFTA: *International Fair Trade Association*

LSM: Lembaga Swadaya Masyarakat

NGO: *Non-Governmental Organization*

PET: *Polyethylene Terephthalate*

SDM: Sumber Daya Manusia

SER: *Social and Environmental Responsibility*

WHO: *World Health Organization*

WTO: *World Trade Organization*

BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada era Globalisasi, yang sangat mempengaruhi manusia adalah teknologi. Melalui kemajuan teknologi yang berkembang pesat, dunia menjadi tanpa sekat dan tanpa jarak. Hal tersebut juga membuat intensitas interaksi antara masyarakat dunia menjadi sangat tinggi yang secara tidak langsung menciptakan hubungan interdependensi yang tinggi. Salah satu pengaruh globalisasi adalah telah adanya pergeseran isu dalam Hubungan Internasional dari isu “*high politics*” ke isu “*low politics*”. Salah satu isu *low politics* yang sangat mempengaruhi dunia di era globalisasi adalah isu ekonomi, yang didalamnya terdapat aktivitas perdagangan adil, konsep kemitraan dagang yang didasarkan oleh dialog, transparansi, dan kesetaraan untuk memberdayakan produsen kecil dan pekerja di dunia berkembang. Konsep ini dicetuskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pasca perang dunia kedua.

Fair Trade sendiri memiliki 10 prinsip yang untuk menciptakan peluang bagi produsen kecil seperti transparansi, akuntabilitas, meningkatkan kesejahteraan, kesetaraan gender, mendahulukan hak-hak pekerja, dan ramah lingkungan. Selain itu adanya konsep perdagangan adil atau yang biasa disebut dengan *Fair Trade*, terdapat pula konsep perdagangan bebas yang pertama kali dicetus di Inggris pada abad 17. Menurut teoritis Adam Smith dan David Ricardo yang membahas paham liberalisme, mereka menekankan pentingnya mekanisme pasar bebas yang tidak diintervensi pihak manapun, termasuk negara¹. Perdagangan bebas diyakini dapat membentuk pembagian kerja internasional (*international division of labour*) yang menciptakan

¹ Aknolt K. Pakpahan dan Bob S. Hadiwinata, *Fair Trade Gerakan Perdagangan Alternatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 11.

keuntungan karena negara akan berlomba-lomba memproduksi dan mengekspor barang dan jasa ke pasar internasional yang memiliki konsumen yang sangat banyak. Kepercayaan ini yang dijalankan negara-negara liberal-kapitalis sehingga terbentuknya rezim perdagangan internasional yang mengikat dan harus dipatuhi seluruh negara di dunia.²

Globalisasi ekonomi kemudian terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan penyebaran kebijakan-kebijakan liberalisasi. Walaupun sempat berhenti di awal abad-19, akibat negara-negara di Eropa melakukan isolasi politik dan menerapkan kebijakan proteksionisme, globalisasi ekonomi lewat perdagangan bebas kembali berjaya pada tahun 1950-an. Hal ini ditandai dengan munculnya Amerika Serikat sebagai negara hegemon dan rezim perdagangan internasional kembali diarahkan ke jalur liberalisasi ekonomi.³ Meluasnya perdagangan bebas maka akan meningkatkan pula jumlah perusahaan multinasional. Karakteristik utama perusahaan multinasional yaitu berbasis untung. Hal ini yang seringkali membuat perusahaan multinasional menggunakan bahan baku murah dan membayar upah pekerja atau buruh seminimal mungkin. Selain itu, perusahaan multinasional juga kerap kali mendegradasi hak asasi manusia (pekerja dan buruh) dan tidak mepedulikan kerusakan lingkungan akibat limbah atau kegiatan produksinya. Hal tersebut semua dilakukan demi mengejar keuntungan dan memenangkan kompetisi yang sangat dijunjung dalam perdagangan bebas.

Dalam praktek perdagangan bebas juga memunculkan berbagai persoalan.

Pertama, adalah mengenai masalah keadilan (*fairness*) terhadap produsen kecil atau

² Ibid, hlm. 1-2

³ Theodore H. Cohn, *Global Political Economy: Theory and Practice 2nd Edition*, (Britain: Longman Publisher, 2003), 418.

pekerja. Perdagangan bebas membuat para pelaku menekan biaya produksi serendah-rendahnya demi orientasi keuntungan dan menyebabkan eksploitasi kaum marjinal.⁴ Para pekerja dibayar dengan upah yang sangat minim, namun harus bekerja dengan tuntutan dari perusahaan yang besar seperti jam kerja yang panjang dan kondisi kerja yang tidak layak. Kedua, pembuatan rezim perdagangan bebas menyebabkan semua negara harus menyeragamkan ketentuan dagang sehingga dapat menghilangkan fleksibilitas dalam proses perdagangan bilateral. Ketiga, masalah pembagian kerja internasional yang tidak merata sehingga menciptakan ketidakmerataan pendapatan antar negara.⁵ Keempat, masalah lingkungan yang seringkali luput dari aktivitas bisnis dalam sistem perdagangan bebas, sehingga produk yang dihasilkan perusahaan multinasional banyak yang tidak ramah lingkungan.

Banyaknya permasalahan perdagangan bebas tersebut mencetuskan pembentukan sistem perdagangan yang lebih baik bagi semua pihak. Sistem ini dinamakan fair trade. Gerakan fair trade hadir untuk memberikan keadilan bagi produsen kecil di negara berkembang dengan mengedepankan pada dialog, transparansi dan penghargaan.⁶ Fair Trade digagas oleh *Non Governmental Organizations* (NGOs) bernama *OXFAM-Great Britain* pada tahun 1960-an. Fair trade muncul dan kemudian terus berkembang sebagai bentuk kekecewaan dan ketidakpuasan terhadap rezim perdagangan bebas oleh *free trade*.⁷ Isu-isu yang menjadi perhatian *fair trade* adalah hak asasi manusia, ketentuan upah minimum bagi pekerja, pekerja perempuan dan anak-anak dan sustainabilitas lingkungan. Aktor-aktor

⁴ Aknolt K. Pakpahan dan Bob S. Hadiwinata, *Politik Bisnis Internasional* (Yogyakarta: Kanisius, 2002), 2-4

⁵ Ibid, Hlm, 16

⁶ Savio Wermansubun, *Fair Trade: Sebuah Alternatif Positif*, (Surakarta: Yayasan Samadi Justice & Peace Institute, 2003), 111.

⁷ Aknolt K. Pakpahan dan Bob S. Hadiwinata, *Politik Bisnis Internasional* (Yogyakarta: Kanisius, 2002), 1

pelaku dalam gerakan *fair trade* antara lain, perusahaan multinasional, organisasi lokal dan komunitas produsen.

Perusahaan multinasional pelaku *fair trade* yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini adalah Patagonia. di era globalisasi ini, Patagonia telah menerapkan prinsip dan nilai-nilai *fair trade* dalam dua bidang. Salah satu bidang yang disoroti dalam penelitian ini yaitu kesejahteraan pekerja. Sebagai salah satu perusahaan multinasional yang besar, Patagonia tidak hanya berfokus pada *profit* namun juga memperhatikan keberlangsungan pekerja-pekerja mereka. *Patagonia* menggunakan bahan-bahan yang alami untuk membuat pakaian. Maka dari itu, penulis memutuskan untuk memilih judul penelitian, Penerapan Prinsip-prinsip Fair Trade oleh Patagonia terhadap pekerja-pekerjanya.

1.2. Identifikasi Masalah

Konsep perdagangan bebas (*free trade*) yang pada mulanya dipercaya dapat memberi dampak positif, namun seiring berjalannya waktu dalam prakteknya menjumpai berbagai permasalahan. Perdagangan bebas dianggap hanya menguntungkan negara besar dan perusahaan multinasional serta di sisi lainnya memberikan dampak negatif bagi negara-negara dunia ketiga. Permasalahan mendasar yang dihadapi perdagangan bebas diantaranya, perdagangan bebas meningkatkan tingkat kompetisi tinggi dan pada akhirnya menghasilkan pihak yang kalah dan menang. Pihak menang adalah mereka yang kuat dan dominan, mereka mampu untuk bertahan dan mendapatkan keuntungan. Sedangkan sisanya yang kalah harus merasakan dampak kompetisi perdagangan yaitu tidak meratanya distribusi kesejahteraan.⁸ Alasan lain adalah masalah penyeragaman ketentuan mengenai free

⁸ Aknolt K. Pakpahan dan Bob S. Hadiwinata, *Politik Bisnis Internasional* (Yogyakarta: Kanisius, 2002), 2

trade yang ditetapkan GATT dan WTO. Ketentuan universal (multilateral) yang dibuat oleh kedua lembaga tersebut dinilai terlalu memaksa seluruh negara di dunia untuk mengikuti dan memiliki *opportunity cost* yang terlalu tinggi. Sehingga menghilangkan kesempatan untuk mengadakan hubungan dagang secara bilateral yang lebih mengusung pada prinsip-prinsip keadilan, pemerataan dan keseimbangan.⁹

Dari kedua alasan diatas, pihak yang kalah atau tidak diuntungkan dalam perdagangan bebas adalah negara-negara berkembang dan serta petani produsen kecil. Ketidakadilan paling sering ditimbulkan adalah produsen dan petani kecil di negara-negara berkembang susah payah memproduksi barang seperti, kopi, coklat, gula, kacang-kacangan dan lain-lain namun hanya memperoleh upah yang sangat kecil sedangkan penduduk negara-negara maju membeli produk yang mereka hasilkan dengan harga mahal. Hal tersebut karena dalam proses ekspor-impor terdapat banyak perantara dagang yang mengambil keuntungan besar. Sehingga taraf hidup petani dan produsen kecil tersebut harus hidup dibawah standar hidup yang layak dan tak jarang dari mereka pun pernah merasakan produk-produk berkualitas yang mereka telah hasilkan.

Alasan lain adalah yang dihadapi perdagangan bebas adalah masalah keberlanjutan lingkungan. *World Trade Organization* (WTO) seringkali lupa memberlakukan ketentuan ramah dan tidak merusak lingkungan (*environmental friendly*) terhadap produk yang diproduksi sebuah perusahaan. Hasilnya banyak produk yang dihasilkan dan diperdagangkan secara internasional menghasilkan polutan, yang merusak air tanah, mengganggu flora dan fauna dan menyebabkan pemanasan global.¹⁰

⁹ Ibid, Hlm, 3.

¹⁰ Ibid, Hlm, 3-4.

Usaha telah dilakukan oleh kalangan pebisnis terhadap pemerintah di sebuah negara juga sering memperbolehkan produksi-produksi produk tersebut dan isu konservasi lingkungan tidak diperhatikan.

Dari penjelasan diatas, tiga isu utama yang lalai atau tidak diperhatikan oleh *free trade* adalah isu “Keadilan”, “Hak Asasi Manusia” dan “Keberlanjutan lingkungan hidup”. Permasalahan *free trade* ini yang kemudian memunculkan kritik dan dengan bersamaan melahirkan gerakan fair trade. Gerakan fair trade diusung untuk mengusahakan terciptanya keadilan bagi negara-negara dunia ketiga pada umumnya dan produsen kecil di negara tersebut pada khususnya. Diharapkan melalui prinsip-prinsip fair trade, produsen kecil di negara berkembang dapat memperoleh upah kerja yang layak, keadaan kerja yang memadai, kesejahteraan hidup tanpa mengabaikan sustainabilitas lingkungan. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi mengenai prinsip-prinsip *Fair Trade* Patagonia yang ada di India.

1.2.1. Pembatasan Masalah

Untuk mendapatkan data dan informasi yang relevan, aktual dan akurat, penulis membatasi masalah pada usaha penerapan prinsip-prinsip *fair trade* yang dilakukan sebuah perusahaan multinasional dalam rangka menjaga keberlangsungan lingkungan dan kesejahteraan petani di negara miskin dan berkembang. Dalam penelitian ini, penulis memilih Patagonia sebagai perusahaan multinasional yang bergerak di *sustainable fashion* dan telah melakukan upaya dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip *fair trade*. Fokus pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah upaya *Patagonia* dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip kepada pekerja-pekerja dan pemasok material di cabang-cabang mereka.

1.2.2. Rumusan Masalah

Menurut penjelasan yang telah dijabarkan diatas, maka pertanyaan penelitian yang dirumuskan penulis adalah: *Bagaimana Patagonia Menerapkan Prinsip-prinsip Fair Trade terhadap Pekerjaannya?*

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan prinsip-prinsip fair trade yang diimplementasi oleh perusahaan multinasional.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan praktis dan teoritis, yaitu diharapkan mampu memberikan wawasan, pemahaman dan informasi bagi para pembaca terkait definisi dan mekanisme fair trade terutama penerapan prinsip-prinsip fair trade yang dilakukan oleh Patagonia melalui pembuatan pakaian-pakaian. Penulis juga berharap penelitian ini dapat dijadikan referensi dan menambah pengetahuan bagi orang-orang yang menaruh perhatian terhadap isu *fair trade*.

1.4. Kajian Literatur

Dalam makalah penulisan ini, penulis akan menggunakan tiga jurnal sebagai perbandingan dalam sub-bab kajian literatur. Jurnal pertama yang digunakan penulis berjudul *The Last Ten Years: A Comprehensive Review of the Literature on the Impact of Fairtrade* karangan Valerie Nelson dan Barry Pound. Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa berdasarkan data studi di lapangan selama sepuluh tahun lamanya, gerakan fair trade mampu memberikan keuntungan ekonomi dan meningkatkan taraf

hidup petani dan produsen berskala kecil.¹¹ Karena mereka juga dikenalkan terhadap teknologi, produk-produk yang dihasilkan pun menjadi lebih inovatif, kreatif dan spesifik dapat menemui sasaran tepat di pasar. Salah satu dampak *fair trade* yang paling dirasakan yaitu yang terjadi pada produsen kopi asal Amerika Latin. Adanya kontrak panjang dan kiat-kiat menghadapi gagal panen dan krisis dari organisasi *fair trade* telah membantu mereka bertahan ketika krisis kopi melanda tahun 1990-an. Dalam jurnal tersebut penulis melihat dampak paling terasa sejak adanya *fair trade* adalah menghasilkan penghasilan yang stabil bagi produsen dan petani, *supply* produk jadi lebih stabil dengan harga yang stabil pula yang bisa dinikmati konsumen, pemberdayaan masyarakat sekitar dengan terbukanya lapangan kerja yang lebih banyak, dan *fair trade* juga membantu mempromosikan dan menjaga keberlangsungan lingkungan.¹²

Dalam jurnal tersebut menemukan bahwa bukti kuat bahwa *fair trade* memberikan peluang ekonomi yang menguntungkan bagi keluarga petani kecil yang mampu membantu organisasi produsen dan menyediakan produk dengan spesifikasi yang tepat untuk pasar. Sebagian besar menemukan pengembalian yang lebih tinggi dan pendapatan yang lebih stabil sebagai manfaat jelas yang dinikmati oleh produsen perdagana yang adil dari penjualan ke pasar *fair trade* dibandingkan dengan penjualan ke pasar konvensional dan hasil dari jurnal ini, masih perlu perbaikan dan peningkatan dalam mekanisme *fair trade*. Hal tersebut di bidang peningkatan pengetahuan bagi petani dan produsen kecil di skala nasional. Mereka selama ini hanya beroperasi di bidang usaha masing-masing, dan hanya sedikit yang membentuk komunitas *fair trade*

¹¹ Valerie Nelson dan Barry Pound, "The Last Ten Years: A Comprehensive Review of the Literatur On the Impact of Fairtrade", *Natural Resources Institute (NRI)* (2009): 7-8.

¹² Ibid

daerah.¹³ Mereka diharapkan lebih lanjut bisa terlibat dalam skala lebih besar seperti mempengaruhi kebijakan pemerintah dan membentuk komunitas *fair trade* nasional.

Jurnal kedua berjudul *A Survey of the Economics of Fair Trade* yang ditulis oleh Ana C. Dammert dan Sarah Mohan. Dalam jurnal kedua, banyak dibahas alasan kemunculan *fair trade* yaitu, sebagai sebuah inisiatif yang bertujuan untuk membantu petani kecil keluar dari kemiskinan dengan menawarkan kepada mereka sebuah mekanisme dan kontak yang mencakup harga, sistem kredit modal, standarisasi bahan baku dan produksi, serta pengenalan teknologi.¹⁴ Namun dalam jurnal tersebut melakukan kritis terhadap *fair trade* yaitu, aturan dan mekanisme *fair trade* seharusnya tidak terlalu kuat mendorong produsen untuk mengubah tata cara produksi terlebih untuk tujuan meningkatkan pendapatan. Karena produsen butuh waktu transisi dari metologi produksi tradisional ke modern. Jurnal ini juga memberikan saran agar barang-barang produksi produsen kecil *fair trade* seharusnya tidak terlebih dahulu menyentuh pasar bebas internasional. Karena pasar bebas memungkinkan permintaan barang dalam jumlah yang besar, namun di sisi lain survei membuktikan angka produksi *fair trade* masih relatif kecil. Ditakutkan terjadi kekacauan dan konsumen beralih ke produk lain ketika *supply* tidak terpenuhi.¹⁵

Menurut jurnal kedua, aturan *fair trade* tidak serta mendorong produsen untuk mengubah praktik produksi untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan. Namun, sejauh *fair trade* mendukung adanya pembentukan koperasi dan koperasi tersebut menjadi badan pemberi nasihat ketnis yang kompeten, *fair trade* juga dapat mendorong peningkatan produktivitas¹⁶.

¹³ Ibid, Hal, 35-37

¹⁴ Ana C. Dammert & Sarah Mohan, "*A Survey of the Economics of Fair Trade*," IZA Publisher. (2014). 1

¹⁵ Ana C. Dammert & Sarah Mohan, "*A Survey of the Economics of Fair Trade*," IZA Publisher. (2014). 24-25

¹⁶ Ibid, Hal, 28.

Jurnal terakhir yang dijadikan referensi adalah *Fair Trade: Three Key Challenges for Reaching the Mainstream* karangan Anil Hira dan Jared Ferrie. Dalam jurnal ini disebutkan bahwa mekanisme *fair trade* sebenarnya sudah sangat baik dan dampak baiknya sudah dirasakan banyak pihak terutama petani dan produsen kecil. Namun seiring dunia yang terus berkembang dalam era globalisasi, terdapat tiga tantangan yang harus dihadapi untuk mewujudkan *fair trade* yang seratus persen adil. Tantangan pertama adalah, kebingungan merumuskan suatu definisi tepat dan seragam mengenai *fair trade* dan bagaimana kriteria perusahaan yang bisa mendapat sertifikat *fair trade*. Apakah perdagangan yang menjunjung prinsip keadilan saja bisa dikatakan *fair trade* atau ada kriteria-kriteria pekerja, produksi, baru bisa dikatakan *fair trade*. Masih menjadi perdebatan pula apakah perusahaan yang ingin membangun reputasi baik di masyarakat internasional dengan tujuan akhir maksimalisasi profit, kemudian ingin bergabung bersama organisasi *fair trade*, bisa dikatakan layak untuk disertifikasi apabila mereka telah memenuhi kriteria dan standar yang lebih ditetapkan.¹⁷

Tantangan kedua mengenai kurang meratanya kesadaran akan *fair trade* di beberapa wilayah, seperti di negara-negara Amerika Utara. Hal ini masih diperkirakan sejumlah pihak akibat kurang potensialnya negara-negara di Amerika Utara secara ekonomi, hingga organisasi dan perusahaan yang bersertifikasi *fair trade* enggan masuk ke wilayah tersebut.¹⁸ Tantangan terakhir dalam jurnal tersebut adalah seberapa jauh *fair trade* mampu berkontribusi terhadap pembangunan di suatu negara?¹⁹

¹⁷ Anil Hira & Jared Ferrie, "Fair Trade: Three Key Challenges for Reaching the Mainstream," *Journal of Business Ethics* 63 (2006). 107

¹⁸ Anil Hira & Jared Ferrie, "Fair Trade: Three Key Challenges for Reaching the Mainstream," *Journal of Business Ethics* 63 (2006). 109

¹⁹ Ibid, Hal. 112

Dalam penelitian ini, penulis berfokus pada peluang dari *fair trade* untuk mensejahterakan para masyarakat ataupun pekerja yang berada di Patagonia. Menurut kajian literatur diatas, penulis mempercayai bahwa fair trade memberikan peluang ekonomi yang menguntungkan bagi keluarga petani kecil yang mampu membantu organisasi produsen dan menyediakan produk dengan spesifikasi yang tepat untuk pasar.

1.5. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa konsep teoritis yang disusun kedalam kerangka pemikiran untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kerangka pemikiran memiliki definisi yaitu kumpulan beberapa teori dan model dari literatur yang membantu menjelaskan dan menjawab masalah penelitian.²⁰ Teori-teori dibutuhkan untuk menjelaskan dan menjawab kasus guna mempermudah pembaca mengerti hal yang dibahas dalam penelitian ini dan sekaligus untuk memperkuat argumentasi penulis.

Isu-isu dalam Hubungan Internasional yang dulu hanya berfokus pada isu '*high politics*' kini telah bergeser pada isu-isu '*low politics*'. Pergeseran tersebut tak lain disebabkan oleh globalisasi yang membuat dunia dianggap menjadi satu tanpa sekat dan tanpa batas. Globalisasi lambat laut mengikis pernyataan, negara sebagai kekuatan utama dan satu-satunya aktor dalam Hubungan Internasional dan dengan bersamaan memunculkan banyak aktor non-negara yang kini memiliki peran penting dan strategis dalam tatanan internasional. Penulis mengambil rujukan dari tulisan *Jan Aart Scholte* yang mendefinisikan globalisasi dalam lima istilah.²¹ Istilah pertama

²⁰ Dr. Uber Silalahi, MA., *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2009), Hlm 91.

²¹ Jan Aart Scholte, *Globalization: A Critical Introduction* (New York: PALGRAVE, 2000), 15.

adalah “Internasionalisasi”, globalisasi menurut istilah pertama berarti adanya peningkatan interaksi, aktivitas dan interdependensi lintas batas negara. Kedua, globalisasi diartikan sebagai “liberalisasi” yaitu proses meminimalisir atau bahkan menghilangkan hambatan pergerakan yang dibuat pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan integrasi ekonomi. Berikutnya, globalisasi juga dipandang sebagai “universalitas” yaitu proses penyebaran barang dan atau suatu ideologi ke seluruh dunia dengan mudah dan menyeluruh. Istilah keempat erat kaitannya dengan penyebaran nilai, budaya barat dan ideologi demokrasi oleh Amerika Serikat, sehingga memunculkan istilah ‘westernisasi’. Kelima adalah “deteritorialisasi” yang berarti semakin mudarnya batas dan letak geografis negara.²²

Dalam penelitian ini, istilah “internasionalisasi” menurut Scholte dirasa paling tepat untuk menggambarkan interaksi dan aktivitas yang terbentuk akibat adanya gerakan *free trade* dan *fair trade*. aktivitas jual dan beli yang berlangsung dalam kurun waktu cukup panjang tersebut yang kemudian menciptakan interdependensi antara *supplier* (mayoritas negara-negara dunia ketiga) dan perusahaan multinasional.

Seiring cepatnya pengaruh globalisasi dan kemajuan teknologi yang tak terbendung, teori Hubungan Internasional pun bukan hanya dipandang berasal dari teori realisme, yang menganggap aktor utama yang paling penting hanyalah negara, keamanan nasional adalah inti dari kepentingan nasional hanya mampu ditempuh dengan cara-cara militer. Terbukti dengan terbentuknya konsep “*Global Village*” yaitu

²² John Bayliss and Steve Smith, *The Globalization and World Politics: An Introduction to International Relations* (Britain: Oxford University Press, 2001), 187.

terjadinya peningkatan interaksi yang bersifat sosial dan ekonomi yang membuat dunia menjadi tanpa batas.²³

Teori pluralisme melihat bahwa negara bukan satu-satunya aktor utama, melainkan aktor-aktor non negara seperti organisasi internasional, NGO dan perusahaan multinasional memiliki kekuatan independen dan dapat mempengaruhi perilaku negara dan sistem internasional, khususnya di bidang ekonomi. Kaum pluralis juga melihat bahwa agenda politik internasional juga mengalami perluasan, bukan hanya terkait isu keamanan melainkan isu-isu ekonomi, sosial, lingkungan, energi, pangan dan sebagiannya telah memiliki posisi dan urgensi yang sama dengan isu-isu militer.²⁴ Isu yang menurut pluralisme menjadi spesial dan sangat diprioritaskan adalah terkait isu ekonomi.

Pluralisme ini menekankan bahwa aktor non-negara yaitu; Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau NGO yang melakukan perdagangan lintas batas negara. Aktor-aktor non negara seperti NGOs ini muncul untuk membantu mengatasi permasalahan di negara-negara miskin dan berkembang, khususnya untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik, menurut David Korten, NGOs terdiri atas tiga tipe, yaitu *first, second and third generation*. *First Generation* merupakan NGOs yang bergerak dibidang kemanusiaan dan fokus terhadap kesejahteraan dan bantuan darurat. Kemudian, *second generation* fokus terhadap pengembangan dan penumbuhan kesadaran masyarakat-masyarakat lokal. Terakhir, *third generation* menggolongkan NGOs yang

²³ Paul R. Viotti and Mark V. Kauppi, *International Relation Theory: Realism, Pluralism and Globalism* (New Jersey: Prentice Hall Inc, 1997), 192.

²⁴ Ibid.

fokus pada *policy advocacy*, yaitu mengubah kebijakan di skala nasional maupun internasional.²⁵

Selain penggolongan tipe NGOs oleh David Korten tersebut, ada pula penggolongan NGOs berdasarkan fungsinya. Fungsi-fungsi tersebut antara lain, advokasi; mendistribusikan bantuan kemanusiaan; mengawasi aturan lingkungan; mengumpulkan dan menginformasikan informasi pada publik; berpartisipasi dalam konferensi global; meningkatkan partisipasi publik; mensosialisasikan aturan baru; kerangka isu untuk konsumsi publik dan menggantikan peran pemerintah ketika terjadi kekosongan dan ketidakadilan.²⁶

NGOs dianggap menjadi aktor penting dalam penggagas konsep *fair trade*. *Fair Trade* sendiri merupakan suatu aktivitas perdagangan yang didasarkan pada dialog, transparansi dan penghargaan guna membangun keadilan yang lebih besar dalam perdagangan internasional. *Fair Trade* dibentuk untuk mendukung proses pembangunan berkelanjutan dengan menawarkan kondisi perdagangan yang lebih baik serta memenuhi hak-hak produsen kecil dan kaum pekerja terutama di negara miskin dan berkembang. *Fair Trade* muncul akibat ketidakpuasan dari konsep *free trade*. *Fair Trade* menilai *free trade* memberlakukan praktek perdagangan tidak adil, karena masih mempertahankan posisi perantara dagang yang meraup keuntungan sebanyak-banyaknya. *Fair Trade* mengadopsi prinsip-prinsip hak asasi manusia, pelestarian lingkungan hidup, pengentasan kemiskinan, keadilan dan keberlanjutan usaha. Sejarah *Fair Trade* pertama kali dimulai saat diperkenalkan oleh OXFAM-Great Britain tahun 1960-an. Kemudian *fair trade* terus berkembang ke berbagai negara seiring dengan

²⁵ Bob Sugeng Hadiwinata, *The Politics of NGOs in Indonesia: Developing Democracy and Managing Development* (London: Routledge Curzon, 2003), 23

²⁶ Margaret P. Karns and Karen A. Mingst, *Internasional Organization: The Politics and Processes of Global Governance* (London: Lynne Rienner Publisher, 2004) 229.

semakin gencarnya kampanye *fair trade* itu sendiri. Sekarang produk *fair trade* telah mencakup berbagai bidang seperti, produk tekstil, kerajinan tangan, makanan dan minuman dan sektor jasa.

Fair Trade merupakan suatu aktivitas perdagangan yang didasarkan pada dialog, transparansi dan penghargaan guna membangun keadilan yang lebih besar dalam perdagangan internasional. *Fair Trade* dibentuk untuk mendukung proses pembangunan berkelanjutan dengan menawarkan kondisi perdagangan yang lebih baik serta memenuhi hak-hak produsen kecil dan kaum pekerja terutama di negara miskin dan negara berkembang. *Fair Trade* muncul akibat ketidakpuasan dari konsep *free trade*. *Fair Trade* menilai *free trade* memberlakukan praktek perdagangan tidak adil, karena masih mempertahankan posisi perantara dagang yang meraup keuntungan sebanyak-banyaknya.²⁷ *Fair Trade* mengadopsi prinsip-prinsip hak asasi manusia, pelestarian lingkungan hidup, pengentasan kemiskinan, keadilan dan keberlanjutan usaha.²⁸

Fair Trade memiliki sepuluh prinsip yaitu “Menciptakan peluang bagi produsen kecil”, “Transparansi dan Akuntabilitas”, “Melakukan Praktik Perdagangan”, “Pembayaran yang Layak dan Adil”, “Memastikan tidak ada Tenaga Kerja Anak dan Tenaga Kerja Paksa”, “Komitmen untuk Tidak Mendiskriminasi, Mengutamakan Kesetaraan Gender dan Kebebasan Berasosiasi”, “Memastikan Kondisi Kerja yang Layak”, “Meningkatkan Kapasitas”, “Mempromosikan dan Mensosialisasikan *Fair Trade*”, “Menghormati keberlanjutan lingkungan”. Sepuluh prinsip tersebut yang mendasari tindakan dan aktivitas setiap aktor yang tergabung dalam gerakan *fair trade*.

²⁷ David Ransom, *The No.-NonSense Guide to Fair Trade* (Oxford: New Internationalist Publications, 2009), hlm. 122.

²⁸ Ibid

David Ransom membagi *fair trade* kedalam tiga model. Pertama, untuk produk primer dan kerajinan, *fair trade* hadir sebagai upaya mempermudah dan memperpendek rantai distribusi barang dari produsen di negara berkembang menuju konsumen di negara maju. Kedua, untuk produk-produk olahan seperti kopi, teh, coklat, *fair trade* hadir untuk menguntungkan petani atau peternak di negara berkembang dengan memberikan upah yang layak bagi mereka. Karena olahan-olahan tersebut sebenarnya dijual dengan harga tinggi di supermarket-supermarket negara maju. Ketiga, *fair trade* hadir untuk meminimalisir segala tindakan yang melanggar prinsip kemanusiaan dan sustainabilitas lingkungan.²⁹

Pada intinya *fair trade* diharapkan mampu mewujudkan mekanisme perdagangan internasional yang lebih baik dan memberi keadilan terhadap semua pihak (Produsen, Pekerja dan Konsumen). Selain NGOs aktor penting lainnya dalam *fair trade* adalah perusahaan multinasional. Definisi perusahaan multinasional menurut Colman dan Nixon adalah unit-unit usaha yang memiliki akses untuk mengontrol aset-aset seperti, pabrik, pertambangan, perkebunan, pusat penjualan dan perkantoran antara lain, lingkup kegiatan lintas batas negara, ada kontrol terhadap teknologi dan modal, pengembangan usaha terutama pada sistem modal ventura, lisensi dan *franchise* (waralaba).

Kontribusi sangat besar perusahaan multinasional memiliki kemampuan mengontrol kegiatan produksi, arus barang di sebuah negara, transfer teknologi dan akhirnya dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah suatu negara. Terdapat tiga faktor perusahaan multinasional melakukan ekspansi dagang ke negara lain. Pertama, sesuai dengan karakter perusahaan multinasional "*profit-oriented*", ekspansi dilakukan untuk

²⁹ Ibid

mengejar pendapatan yang lebih besar atau maksimal (*profit maximizer*). Kedua, terkait daur hidup produk (*product life cycle*) yaitu perusahaan multinasional melakukan ekspansi ke negara lain karena produk di negaranya telah usang, banyak kompetitor lain yang memproduksi barang sejenis dan menghindari kerugian akibat kadaluarsa produk. Ketiga, adanya perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi sehingga terbuka peluang mengirim barang ke luar negaranya dengan mudah, murah dan cepat.

Menurut sudut pandang pelaku bisnis khususnya perusahaan multinasional, *fair trade* harus memiliki unsur harga yang adil; kompetisi yang adil; penghapusan kuota; hambatan tarif dan non-tarif dalam aktivitas perdagangan internasional. Setiap pelaku usaha yang bergabung dalam organisasi *fair trade* harus menandatangani dan patuh pada perjanjian dalam *The International Fair Trade Association* (IFAT).³⁰ Walaupun berbasis *profit*, di era globalisasi ini sudah cukup banyak perusahaan multinasional yang menyadari bahwa kegiatan produksi dan bisnisnya kerap kali membawa dampak negatif terhadap sustainability lingkungan dan masalah sosial lainnya. Masalah pemanasan global, masalah-masalah lingkungan lainnya, masalah HAM yang semakin meluas dan mengkhawatirkan, menyebabkan kesadaran perusahaan multinasional untuk ikut terlibat menyelesaikan masalah tersebut, salah satunya dengan bergabung dan menerapkan prinsip-prinsip *fair trade*. Salah satu perusahaan multinasional yang mendukung serta mengimplementasikan prinsip-prinsip *fair trade* adalah Patagonia. Perusahaan yang menjual produk pakaian dan alat *outdoor* yang menerapkan prinsip *fair trade* guna membantu melestarikan hidup pekerjanya.

³⁰ "History of WFTO," *World Fair Trade Organization*, <http://wfto.com/about-us/history-wfto>

1.6. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.6.1. Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan oleh penulis untuk kajian penulisan ini adalah metode penelitian kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Metode kualitatif memiliki definisi yakni suatu proses penyidikan yang berguna untuk memahami suatu masalah sosial didasarkan pada penciptaan gambaran holistik lengkap yang dibentuk dengan rangkaian kata, dengan terperinci melaporkan pandangan informan dan disusun menjadi sebuah latar ilmiah.

1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan teknik studi dokumen. Data-data yang akan digunakan dikumpulkan melalui jurnal-jurnal resmi cetak maupun online, studi literatur, internet, informasi media massa terbaru, artikel dan buku-buku yang memiliki relevansi dengan penelitian. Kemudian terkait dengan data sekunder, penulis akan mengumpulkan data melalui situs-situs resmi, seperti *website* Patagonia, *Fair Trade Organization* sedangkan untuk data sekunder, akan diambil rujukan sumber dari hasil tulisan para ahli yang akan diinterpretasikan ulang sesuai pemahaman dan perspektif penulis.³¹ Menurut dari penjabaran diatas maka penulis mengadopsi teori pluralisme dalam mengkaji penelitian ini.

³¹ Emma Smith, *Using Secondary Data in Educational and Social Research* (London: McGrawhill, 2009), Hlm. 20

1.7. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, penulis akan membagi penulisan ke dalam empat bagian:

- Bab I akan menjelaskan latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian literatur, kerangka pemikiran, metode penelitian dan teknik pengumpulan data dan sistematika pembahasan.
- Bab II akan menjelaskan mengenai mengenai profil Patagonia sebagai perusahaan multinasional dan gambaran umum gerakan fair trade. Bab ini akan dimulai dengan penjelasan lengkap mengenai profil Patagonia, mulai dari sejarah pembentukan, perkembangan, prinsip perusahaan, struktur perusahaan dan aktivitas sosial.
- Bab III akan menjelaskan bagaimana Patagonia menjalankan *fair trade* dan apa yang dilakukan oleh Patagonia sehingga perusahaan tersebut dapat dikategorikan telah mensejahterakan pekerjanya.
- Bab IV akan menjelaskan kesimpulan dan saran.